



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 3/ORT.07/3306/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/ORT.07/3306/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 4/PK.01/3306/2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
2. Meningkatkan koordinasi dan rasa tanggung jawab antara Pengarah, Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
3. Menciptakan birokrasi yang berintegritas, berdedikasi serta meningkatkan kualitas penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kode etik yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Wakil Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR: 3/ORT.7/3306/2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022

RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2022

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo yang terdiri dari: 1) Tim Pengarah 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan)	SK Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022	√												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3) Tim Agen Perubahan 4) Tim Assesor														
			1. Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan RB secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan Satker komitmen pelaksanaan RB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Menyusun Rencana Aksi Tahunan RB	Rencana Aksi Tahunan RB	√	√											
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang mudah di akses				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara	1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemilu dan ASN dilaksanakan pada apel pagi	<p>penyelenggara pemilu</p> <p>2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN</p>													
			<p>3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja</p> <p>1) Penandatangan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu</p> <p>2) Pelaporan LHKPN setiap tahun</p>	<p>1. Persentase penandatangan Pakta Integritas anggota KPU dan semua pegawai sekretariat</p> <p>2. Persentase pelaporan LHKPN</p>	√												
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di satker	Diterapkannya budaya kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5. Pembangunan instrumen yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan publik	Pelaksanaan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan satker		√											
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan Satker	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan							√						√
			2. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan	Tersedianya Lembar Kerja Evaluasi (LKE)													√
			3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di Satker	Terkirimnya laporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan													√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo (Pengaturan dan/atau Penetapan)	Pemetaan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Adanya data Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kab. Purworejo						√							√	
		2. Menyempurnakan/mengubah Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo (Pengaturan dan/atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Penyusunan revisi Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Jumlah Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kab. Purworejo yang sudah di Revisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Merumus-kan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo baru (Pengaturan dan/atau Penetapan) yang dipandang diperlukan	Penyusunan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo yang diperlukan sesuai kebutuhan (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kab. Purworejo	Jumlah Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo (Pengaturan dan/atau Penetapan) di lingkungan KPU Kab. Purworejo yang sudah di sahkan		√											
		4. Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Purworejo	1. Pengembangan laman JDIH KPU Kabupaten Purworejo dan Instagram JDIH KPU Purworejo;	1. Dapat diaksesnya laman JDIH KPU Kabupaten Purworejo dan Instagram JDIH KPU Purworejo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Pengelolaan laman JDIH KPU Kabupaten Purworejo dan Instagram JDIH KPU Purworejo.	2. <i>Update</i> data dan informasi pada laman JDIH KPU Kabupaten Purworejo dan Instagram	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				JDIH KPU Purworejo.													
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.	1. Membuat struktur organisasi; 2. Melakukan pembagian kerja berdasarkan keahlian dan ketrampilan masing-masing pegawai dimana tugas pegawai didasarkan pada spesialisasi skill yang dimiliki; 3. Menginformasikan kepada pegawai terkait diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.	Peningkatan produktivitas dan inovasi pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4.	Penataan Tata Laksana	1. Peningkatan tata laksana proses bisnis serta SOP di lingkungan Satker	Penyusunan SOP sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satker. Sebelum pelaksanaan kegiatan	Tersusunnya SOP dan terlaksananya SOP dalam setiap kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			dilaksanakan rapat pleno untuk membahas rencana kegiatan.														
			Menentukan <i>website</i> dan media sosial resmi yang digunakan oleh KPU kabupaten Purworejo	Terbitnya SK KPU Kabupaten Purworejo terkait penentuan <i>website</i> dan media sosial resmi KPU Kabupaten Purworejo		√											
		2. Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik	1. Tata Kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo dengan melakukan penguatan tim PPID	Tersedianya struktur PPID (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Melakukan pemilahan informasi	Terpilihnya informasi antara lain informasi publik, (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi dikecualikan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Meningkatkan publikasi kegiatan KPU Kabupaten Purworejo	Meningkatnya respon dari masyarakat													
		3. Tata Kelola dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di	1. Tata Kelola SPBE di lingkungan Satker: 1) Strategi dan perencanaan anggaran dan belanja TIK	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE 2. Anggaran belanja Tik di lingkungan satker	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		lingkungan satker	2) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi 2. Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai	3. Jumlah aplikasi terintegrasi 4. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan													
			3. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan: 1) Aplikasi Manajemen Kepegawaian 2) Aplikasi Perencanaan 3) Aplikasi Penganggaran 4) Aplikasi Keuangan 5) Aplikasi Pengadaan 6) Aplikasi Penanda-tanganan Elektronik	1. Terisinya data Aplikasi Manajemen Kepegawaian 2. Terisinya data Aplikasi Perencanaan 3. Terisinya data Aplikasi Penganggaran 4. Terisinya data Aplikasi Keuangan 5. Terisinya data Aplikasi Pengadaan 6. Terisinya Aplikasi tanda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				tangan elektronik													
			4. Pemanfaatan aplikasi SPBE Pelayanan Publik: 1) Layanan Pengaduan Publik	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2. Dapat diaksesnya laman JDIH KPU Kabupaten Purworejo dan Instagram JDIH KPU Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3) Layanan <i>Wistle Blowing System</i> (WBS)	3. Dapat diaksesnya WBS oleh <i>stakeholder</i> dan jumlah pelapor pengaduan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4) Layanan Kepemiluan	4. Jumlah aplikasi kepemiluan yang dimanfaatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID satker oleh publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Penerapan sistem kearsipan yang handal	1. Memetakan arsip termasuk memetakan dokumen/ informasi <i>hardcopy</i> maupun digital secara baik	1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan satker 2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan satker 3. Terdokumentasinya arsip Kepemiluan secara baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompeten	Adanya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompeten.	Peningkatan kompetensi pegawai													√	
		2. Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi dan melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu berupa pembuatan SKP dan penilaian SKP tiap pegawai	Keselarasn rencana kinerja individu dengan tupoksi						√							√	
		3. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan	Memberikan informasi terkait seleksi jabatan	Hasil pengukuran kinerja						√							√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kebijakan dan pelayanan publik															
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	1. Penetapan Kinerja	Adanya dokumen Penetapan Kinerja	√												
			2. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Persentase Sasaran Kinerja: 1) Jumlah sasaran kinerja 2) Jumlah sasaran kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				yang tercapai 100 %														
			3. Pemanfaatan Aplikasi terintegrasi untuk	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			4. Pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja	Persentase capaian Kinerja Satuan Kerja				√			√			√		√		
			5. Evaluasi capaian kinerja satker	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut: 1) Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan dan anggaran antara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<p>pimpinan dan staf</p> <p>2) Menyusun laporan kinerja dan anggaran (<i>offline</i> dan <i>online</i>)</p> <p>3) Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dan melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan dan anggaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan</p>													
			6. Pelaporan kinerja satker	Pelaporan kinerja satker tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja dengan penyusunan SKP Pegawai	1. Pembuatan SKP ASN	√												
			2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	2. Pengelola PPBJ bersertifikat				√	√								
7.	Pengawasan	1. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kab. Purworejo	1. Pembangunan Komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi	1. Adanya alat sosialisasi Anti Gratifikasi di lingkungan KPU Kab. Purworejo; 2. Tanda tangan Komitmen Anti Gratifikasi di lingkungan KPU Kab. Purworejo.			√										
			2. <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi Anti Gratifikasi kepada			√										

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				stakeholder eksternal													
		2. Pelaksanaan pemantauan Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo			√										
			2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota KPU dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kab. Purworejo	Persentase penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan				√									
		3. Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Terselenggaranya SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan SPIP	Pelaporan Kartu Kendali, data dukung dan Laporan Tahunan SPIP di lingkungan KPU Kab. Purworejo tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Peningkatan Integritas Individu	Penyampaian LHKPN	100% wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kab. Purworejo			√										
8.	Pelayanan Publik	1. Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	1. Menyusun SOP pelayanan data dan informasi	Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi	√												
			2. Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara <i>offline (banner)</i> dan <i>online (website dan media sosial)</i>	Terpublikasinya standar pelayanan informasi kepada publik melalui layanan PPID (melalui <i>banner</i> , <i>website</i> , dan media sosial)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Memusatkan pelayanan data dan	Terpenuhinya permintaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			informasi pada satu tempat yaitu PPID	informasi dan data secara cepat dan akurat													
		2. Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Penyediaan kotak saran dan aduan pada <i>website</i> resmi KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya kotak saran dan aduan pada <i>website</i> KPU Kabupaten Purworejo			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Galeri Demokrasi	1. Tersedianya dan terlaksananya layanan Galeri Demokrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Terfasilitasinya kunjungan Sekolah, Ormas, dan Perguruan Tinggi dalam mengakses Rumah Pintar Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Tersedianya Buku Tamu dan Kotak			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Saran untuk menampung masukan, kritik, dan saran dalam pelayanan Rumah Pintar Pemilu													
9.	Agan Perubahan	1. Sebagai Katalis	<p>1. Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas aturan dan etika dalam pelaksanaan tugas keseharian.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi tentang aplikasi baru yang digunakan di internal satuan kerja.</p> <p>3. Memberikan pelatihan-pelatihan tentang teknologi informasi untuk meningkatkan keterampilan (<i>skill</i>) pegawai</p>	Terpenuhinya literasi pegawai akan aturan dan pemahaman tentang teknologi informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2. Sebagai Penggerak Perubahan	Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan: a. Masuk kantor tepat waktu; b. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan; c. Menyelesaikan pekerjaan/ kegiatan tepat waktu.	Teciptanya komunikasi dua arah yang baik antara pegawai dan pimpinan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Sebagai Pemberi Solusi	Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin	Terbentuknya mental pegawai yang termotivasi dan disiplin	Situasional												
		4. Sebagai Mediator	Memperlancar proses informasi agar informasi diterima maknanya dengan baik	Tersampainya informasi yang benar dan tepat kepada pegawai	Situasional												
		5. Sebagai Penghubung	Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan:	Terciptanya komunikasi dua arah yang baik antara pegawai dan pimpinan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a. Menyampaikan arahan-arahan kebijakan b. Menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/pimpinan														

Ditetapkan di Purworejo
 Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari